

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdurrahman, 1996. *Masalah Pencabutan Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Edisi 1, Cetakan 1*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Basah, Sjachran. 1898. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- Bruggink, JJ. H., 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, (Alih Bahasa Arief Sidharta), Penerbit Cipta Aditya.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- E.Utrecht, 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cet VI*. Jakarta. Penerbit Balai Buku ichtiar.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, Zairin. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang : Penerbit Bayu Media Publishing.
- Indriharto. 1994. *Usaha Menahani Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II, Cetakan ke-IV. Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Jazim Hamidi dan Winahyu E., 2000. *Yurisprudensi Tentang Penerapan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*. Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa.
- John Salindeho, 1988. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

- Marbun,SF. 2001. *Dimensi-DimensiPemikiranHukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Penerbit UII Press.
- Marzuki, PeterMahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogyaakarta: Penerbit Lyberty.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah(Keppres No. 34 Tahun 2003)*. Yogyakarta: Penerbit Tugu Jogja Pustaka.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni
- Situmorang. Victor dan Soediby. 1992. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Penerbit , Rineka Cipta.
- Soemintro Rochmat, 1995, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Penerbit PT. Eresco
- Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Umar Said Sugiharjo,dkk. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Jakarta: Penerbit Setara Press.
- Van Wijk/Willem Konijnenbelt. H. D. 1988. *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg: Penerbit Uitgeverij Lemma Bv.
- Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuslim, 2015.*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Internet:

http://www.ptun-tanjungpinang.go.id/?page_id=681 (Diakses pada hari Selasa 5 Maret 2019, pukul 20:18 WIB)

<https://ptun-denpasar.go.id/index.php/page/95/Sengketa-Pengadaan-Tanah.html>
(Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 13.11 WIB)

https://www.academia.edu/5806205/Keabsahan_KTUN (Diakses pada tanggal: 20 November 2018, pukul 15:20 WIB)

<https://www.suduthukum.com/2017/07/keabsahan-keputusan-tata-usaha-negara.html> (Diakses pada tanggal: 20 November 2018, pukul 19:17 WIB)

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara